

RENCANA KERJA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023





WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 40

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
- b. bahwa rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah telah dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk diselaraskan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 dan rencana kerja perangkat daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan seluruh rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2022 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.
- (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab 1 : pendahuluan;
 - b. Bab 2 : hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun sebelumnya;
 - c. Bab 3 : tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab 4 : rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab 5 : penutup.
- (2) Uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 22 Juli 2022
WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang

pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 40 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

DAFTAR PAGU INDIKATIF RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang	116.701.015.538,00
2	Dinas Kesehatan Kota Magelang	253.248.522.874,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Magelang	33.084.723.651,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Magelang	27.491.385.299,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang	12.833.222.685,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang	5.015.890.376,00
7	Dinas Sosial Kota Magelang	10.838.760.922,00
8	Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang	12.178.715.010,00
9	Dinas Lingkungan Hidup Kota Magelang	26.068.495.135,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang	5.957.775.486,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Magelang	10.779.362.487,00
12	Dinas Perhubungan Kota Magelang	17.438.172.427,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang	11.543.724.980,00

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF (Rp)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang	5.459.016.738,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang	14.133.714.058,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Magelang	5.835.364.546,00
17	Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang	9.317.670.659,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang	19.343.403.224,00
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang	30.025.324.802,00
20	Sekretariat Daerah Kota Magelang	41.955.050.115,00
21	Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang	21.362.524.711,00
22	Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang	21.867.971.591,00
23	Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	19.185.918.044,00
24	Inspektorat Kota Magelang	7.138.116.223,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kota Magelang	8.808.640.947,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang	19.766.988.232,00
27	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Magelang	28.110.596.662,00
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Magelang	7.482.873.810,00
	TOTAL	802.992.941.132,00

WALIKOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



RENCANA KERJA



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023** telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan dimana semua kebijakan, program, sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan Renja Tahun 2023 merupakan kewajiban bagi setiap Perangkat Daerah. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memuat penjabaran program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun tersebut.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan

program dan kegiatan pada Tahun 2023 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang	29
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	33
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2023	36
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	48
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG.....	49
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	49
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	53
3.3 Program dan Kegiatan.....	57
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	66
BAB 5 PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Bappeda Kota Magelang.....	11
Tabel 2.2	Realisasi Target Kinerja Tahun 2021.....	25
Tabel 2.3	Sasaran Strategi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang 2021.....	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	31
Tabel 2.5	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Magelang.....	37
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kota Magelang.....	48
Tabel 3.1	Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang.....	51
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.....	56
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya.....	2
Gambar 1.2	Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	4

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

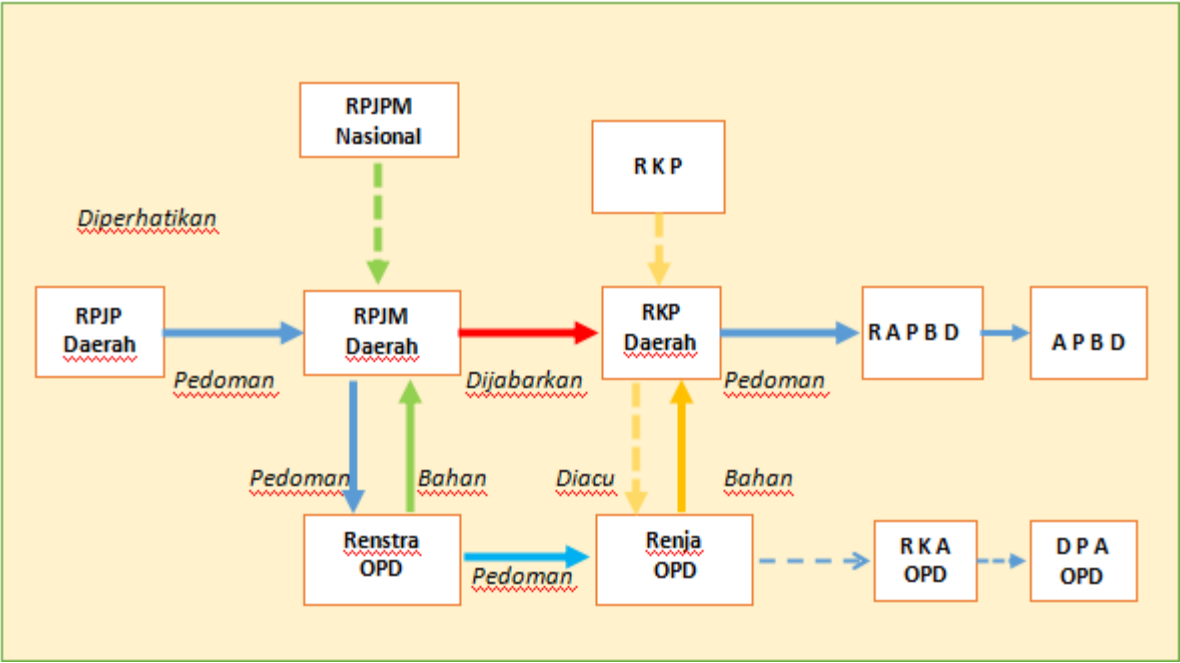
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap Perangkat Daerah menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11) UU Nomor 25 Tahun 2004. Selanjutnya Pada pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa Renja-SKPD disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan (RKP), memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Jadi Renja SKPD menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD” serta juga terdapat dalam Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 124. Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagaimana tercantum di dalam pasal 310 ayat (2).

Mengacu pada peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kota Magelang telah menyusun dokumen RPJPD Kota Magelang 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009. Dokumen RPJP ini menjadi pedoman dokumen RPJMD yang disusun Pemerintah Kota Magelang. Dokumen RPJMD Tahap I (2005-2010) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2005, dokumen RPJMD Tahap II (2011-2015) telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011, dokumen RPJMD Kota Magelang Tahap ke III (Tahun 2016-2021) telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang No 1 Tahun 2016, dan RPJMD Tahap ke IV (Tahun 2021-2026) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 yang menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra OPD periode yang sama. Dokumen RPJMD Kota Magelang akan dijabarkan menjadi dokumen perencanaan tahunan tingkat Kota atau yang disebut dengan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana RKPD tersebut menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan RPJMD tahun 2021-2026, serta mengacu pada RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Renstra Bappeda telah mengalami perubahan dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026. Perubahan Renstra tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang berdampak pada perubahan urusan dan perangkat daerah yang terlibat.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan dan Penganggaran lainnya
Sumber : UU 25 Tahun 2004

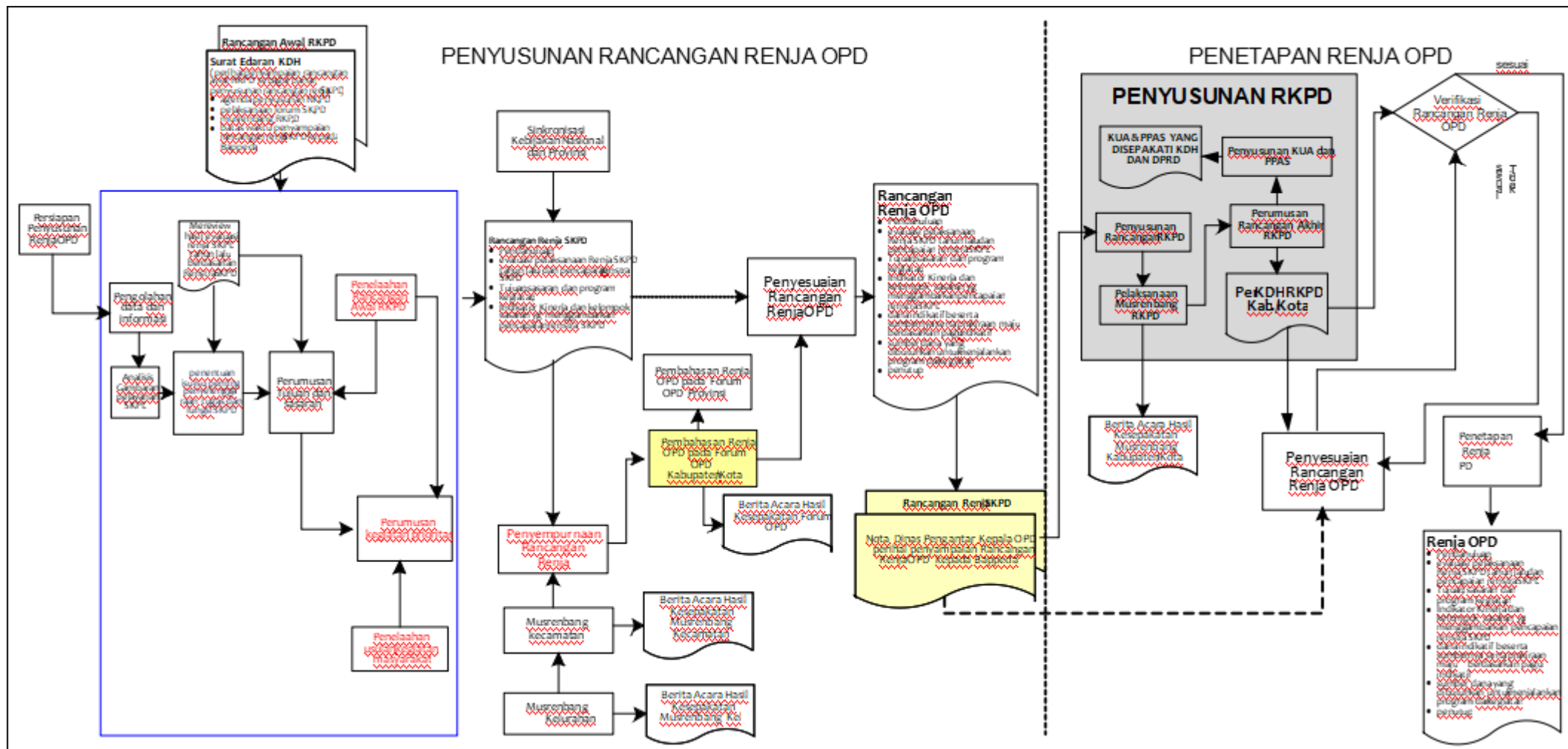
Sesuai dengan Surat Edaran Walikota Nomor 050.24/56/410 tanggal 2 Februari 2022 perihal Penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2023 maka Proses Perencanaan Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 di mulai dari penyusunan Rancangan Renja OPD yang mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2023, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahap selanjutnya adalah sinkronisasi dengan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya serta usulan dari masyarakat hasil Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan dalam Forum OPD dan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menghasilkan prioritas pembangunan. Hasil dari Forum OPD dan FGD selanjutnya menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk dilakukan musrenbang pada tingkat kota.

Selanjutnya Rancangan renja tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada renja perangkat daerah terkait. Setelah melalui proses verifikasi dan penyesuaian akhir dengan RKPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota, maka rancangan Renja Perangkat Daerah dapat ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah setelah ada pengesahan dari Walikota. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 yang akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota digunakan sebagai acuan penyusunan rancangan akhir Renja Bappeda Kota Magelang. Selanjutnya rancangan akhir Renja Perangkat Daerah tersebut disahkan oleh Walikota dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penyusunan RKPD Kota Magelang Tahun 2023. Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Walikota dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Secara sistematis proses penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kota Magelang dapat dijelaskan oleh tabel sebagai berikut:



Gambar 1.2 Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
12. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
20. Peraturan Presiden tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor Registrasi Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah: (5-69/2019));
33. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011 - 2031;
36. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
37. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Bappeda Kota Magelang adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun yang mengacu pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dengan periode 5 (lima) tahun. Adapun maksud dari penyusunan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2023 adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Bappeda Kota Magelang di Tahun 2023 termasuk penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Kota Magelang secara berkesinambungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) tahun yang tersusun dalam rencana.
- b. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun terkait capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dan tujuan perencanaan serta penganggaran tahunan perangkat daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
- c. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Bappeda Kota Magelang pada tahun 2023 berdasarkan pada RKPD Kota Magelang Tahun 2023 dan Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Penganggaran Bappeda Kota Magelang Tahun 2023.
- e. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sistematika Renja OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB 3 TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

- 2.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang
- 2.3 Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja Bappeda Kota Magelang serta pendanaan OPD Bappeda Kota Magelang

BAB 5 PENUTUP

BAB 2

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2021

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra OPD. Renja suatu OPD memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Program dan kegiatan yang tercantum dalam Renja meliputi program dan kegiatan yang sedang berlangsung dan kegiatan alternatif atau baru. Kualitas Renja perangkat daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan.

Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra perangkat daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan atau permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2023 dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappeda Kota Magelang Tahun 2021.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dimaksudkan untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan, untuk mengetahui kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan di lapangan dan untuk bahan pertimbangan apakah program dan kegiatan tersebut sudah mencapai target sasaran sehingga tidak perlu lagi untuk direncanakan pada tahun berikutnya. Fokus utama evaluasi diarahkan pada pelaksanaan rencana pembangunan dan pencapaian target kinerja berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan pelaksanaan Renja pada tahun tersebut. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan yang timbul. Dari permasalahan tersebut yang kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan pada tahun selanjutnya yakni Tahun 2023.

Sebagaimana termaktub dalam sistematika Renja Perangkat Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa perlu dilakukannya evaluasi pelaksanaan dan capaian Renja tahun lalu. Evaluasi terhadap Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Adapun Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

- a. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana.

Pengukuran kinerja ini juga dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Organisasi Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran–sasaran tersebut agar dapat terukur maka dituangkan ke dalam indikator–indikator kinerja. Keberhasilan dari pencapaian sasaran–sasaran dilihat dari pencapaian dari indikator kinerja tersebut. Dengan adanya pengukuran kinerja, maka kita dapat mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Secara rinci, hasil evaluasi dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Bappeda Kota Magelang

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01				PERENCANAAN									
5	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%	-	100%	100%	100%	81%	100%	100%
5	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	3 dokumen	1 dokumen	33.3%
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	13 dokumen	7 dokumen	53.84%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang	-	30 orang	30 orang	100%	30 orang	30 orang	50%
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	12 dokumen	6 dokumen	50%
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%

No				Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	28 paket	-	10 Paket	10 Paket	100%	12 paket	6 paket 50%
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	49 paket	-	42 paket	42 paket	100%	12 paket	6 paket 50%
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 paket	-	2 paket	2 paket	100%	12 paket	6 paket 50%
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	12 paket	6 paket 50%
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 paket	-	26 paket	26 paket	100%	12 paket	6 paket 50%
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	-	6 laporan	6 laporan	100%	6 laporan	1 laporan 16.67%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88 laporan	-	51 laporan	51 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 unit	-	4 unit	4 unit	100%	9 unit	1 unit	11.11%
5	01	01			Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	6 unit	-	2 unit	2 unit	100%	-	-	0%
5	01	01			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 unit	-	1 unit	1 unit	100%	-	-	0%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	-	8 laporan	8 laporan	100%	12 laporan	6 laporan	50%
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	-	15 unit	15 unit	100%	18 unit	9 unit	50%
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan	9 unit	-	9 unit	9 unit	100%	10 unit	5 unit	50%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	dibayarkan Pajak dan Perizinannya								
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 unit	-	2 unit	2 unit	100%	3 unit	3 unit	100%
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 unit	-	10 unit	10 unit	100%	11 unit	11 unit	100%
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	-	3 unit	3 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	95,89%	-				10,27%		
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase elemen pembangunan yang terlibat	85%	-	100%	100%	100%	83%	100%	100%
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 berita acara	-	2 berita acara	2 berita acara	100%	1 berita acara	1 berita acara	100%
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5 berita acara	-	14 berita acara	14 berita acara	100%	5 berita acara	5 berita acara	100%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	-	2 berita acara	2 berita acara	100%	1 berita acara	1 berita acara	100%
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 dokumen	-	3 dokumen	3 dokumen	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	96%	-	100%	100%	100%	96%	100%	100%
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	-	2 buku	2 buku	100%	1 dokumen	0 dokumen	0%
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	85%	-	100%	100%	100%	65%	100%	100%
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	4 laporan	2 laporan	50%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	-	100%	100%	100%	75%	89.53%	119.37%
5	01	03				Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%	-	100%	100%	100%	67%	89.58%	133.70%
5	01	03				Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	-	100%	100%	100%	67%	68.29%	101,92%
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	5 dokumen	1 dokumen	20%
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan	1 laporan	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	1 dokumen	16.67%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	-	-	0%
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	3 dokumen	-	4 dokumen	4 dokumen	100%	4 dokumen	1 dokumen	25%
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja	2 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	6 dokumen	2 dokumen	33.33%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Daerah Bidang Perekonomian	dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian								
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	2 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	6 dokumen	2 dokumen	33.33%
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		-	100%	66.6%	66.6%	100%	100%	100%
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	3 laporan	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	9 dokumen	2 dokumen	22.22%
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	3 dokumen	-	1 dokumen	0 dokumen	0%	-	-	0%
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%	-	100%	100%	100%	0%	0%	0%
5	05	02				Persentase pemanfaatan hasil inovasi	100%	-	100%	100%	100%	24%	0%	0%
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersedian dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%	-	100%	100%	100%	27.78%	100%	100%
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	3 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	1 laporan	0 laporan	100%
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	0 laporan	100%
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi	2 rekomendasi	-	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	0 laporan	100%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan								
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan		-	100%	100%	100%	30%	100%	100%
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen	-	8 produk	8 produk	100%	2 dokumen	1 dokumen	50%
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 laporan	-	-	-	0%	2 laporan	0 laporan	0%
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100%	3 laporan	0 laporan	0%

No					Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 laporan	-	4 laporan	4 laporan	100%	2 laporan	1 laporan	50%

Dari hasil evaluasi Program/Kegiatan pada Tahun 2021, hanya ada satu sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Output kegiatan tersebut adalah dokumen studi kelayakan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kota Magelang. Adapun penyebab tidak terlaksananya kegiatan tersebut dikarenakan pada saat itu belum ada kejelasan lokasi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kota sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan.

Adapun program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang hampir semuanya mencapai target kinerja kecuali sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dimana target kinerjanya adalah 3 dokumen sedangkan realisasinya tercapai 2 dokumen, sedangkan dokumen studi kelayakan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kota Magelang tidak tercapai.

Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tidak dapat mencapai target yang dipengaruhi oleh belum adanya kejelasan mengenai permasalahan Kompleks Gedung Kantor Walikota Magelang, sehingga lokasi pembangunan kantor dalam kajian mengenai studi kelayakan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kota Magelang belum bisa ditentukan.

Adapun program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dari hasil evaluasi yang telah mencapai target kinerja yang telah direncanakan ditunjukkan pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Realisasi Target Kinerja Tahun 2021

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021
1	2	3	4
	PERENCANAAN		
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan internal perangkat daerah yang berkualitas	100%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	100%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021
1	2	3	4
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%
4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%
5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan (CP) Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang dibeli	100%
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021
1	2	3	4
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%
3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
II	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas	
A	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Presentase elemen pembangunan yang terlibat	100%
1	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100%
2	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100%
3	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	100%
4	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	100%
B	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ketersediaan data dukung perencanaan	100%
1	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	100%
C	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rekomendasi yang dihasilkan dalev	100%
1	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100%
III	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	100%
		Tingkat Implementasi Perencanaan Bidang Infrstruktur dan Kewilayahan	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021
1	2	3	4
A	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	100%
2	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100%
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	100%
B	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	100%
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	100%
3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	100%
C	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	66.6%
1	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	100%
2	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	100%
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
IV	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	100%
		Persentase pemanfaatan hasil inovasi	100%
A	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan Ketersediaan dokumen data, riset dan kebijakan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100%
1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	100%
2	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	100%

No	Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021
1	2	3	4
3	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	100%
D	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Cakupan inovasi dan publikasi kelitbangan	100%
1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	100%
2	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	100%
3	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Kinerja pelayanan yang disusun mengandung maksud agar setiap perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat lebih terarah yang secara administratif dapat memenuhi persyaratan yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan skala prioritas yang disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang telah disesuaikan. Dengan demikian perencanaan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang akan lebih bermanfaat dan tepat sasaran sehingga yang menjadi tujuan setiap kegiatan dapat tercapai sesuai harapan.

Capaian Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berdasarkan indikator kinerja pada RPJMD Kota Magelang adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 3
Sasaran Strategi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Magelang 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Terwujudnya perencanaan daerah partisipatif berbasis data yang akurat dan akuntabel	Persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja	100%	85,54%	85,54%
2	Meningkatnya kemampuan pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dan kemitraan	Prosentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	70%	80,34%	114,77 %
3	Mengoptimalkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, inovatif dan berbasis pemanfa-atan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	75%	69,10%	92,13%
4	Mewujudkan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	100%	81,82%	81,82%

Berdasarkan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021 – 2026, maka kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sesuai tugas dan fungsi tercermin pada pencapaian atas indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah` Kota Magelang sampai dengan tahun 2021 adalah sebagaimana tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian*	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Kualitas perencanaan pembangunan daerah	-	-	79,51%	80,98%	18,46%	80,98%	82,44%	
2	Persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal 24,5	-	-	67,85%	78,85%	53,57%	78,85%	89,29%	
3	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	-	-	65,85%	68,29%	30,77%	68,29%	70,73%	
4	Persentase implementasi rencana kelitbangan	-	-	17,02%	36,17%	8,51%	36,17%	55,32%	
5	Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	-	-	24%	49%	0%**	49%	65,17%	
	* Realisasi Capaian Tahun 2022 per April 2022 ** Target Realisasi Capaian pada Tahun 2022 masih 0%, karena pada Tahun 2022 masih tahap persiapan								

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)		(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Presentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Renja	-	-	95%	98%	100%	72,29%	59,04%	85,54%	
2	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam APBD	-	-	65%	68%	70%	81,48%	80,34%	114,77%	
3	Cakupan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif	-	-	65	70%	75%	75%	59,10%	69,10%	
4	Cakupan konsistensi perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan	-	-	100%	100%	100%	100%	99,36%	81,82%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Bappeda, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Isu utama adalah adanya potensi resesi global dan Pandemi Covid 19 yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pelayanan dan pencapaian target kinerja. Sedangkan isu internal yaitu masih rendahnya kualitas perencanaan sehingga perlu ditingkatkan. Hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Bappeda Kota Magelang sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

2.3.1. Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- c. Pelaksanaan Koordinasi di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di atas maka kinerja pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang difokuskan pada pelayanan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah yang dapat meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan dan hambatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi antara lain:

- a) Masih diperlukannya sinergitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan;

- c) Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
- d) Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;

2.3.3. Dampaknya terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap Capaian Program Nasional

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Magelang Tahun 2016–2021, ditetapkan visi pembangunan Kota Magelang yaitu “Magelang Sebagai Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan Religius” Dalam rangka pencapaian visi secara efektif dan efisien disusunlah misi Kota Magelang, yaitu:

- MISI 1 Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- MISI 2 Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta ramah lingkungan.
- MISI 3 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- MISI 4 Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan pengembangan dan pembangunan pariwisata Kota Magelang
- MISI 5 Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang, sebagai garda depan urusan penunjang perencanaan, menyelenggarakan urusan perencanaan memberikan kemudahan dalam rangka mendukung misi ke-1 Kota Magelang yaitu: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3.4. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan

Dalam meningkatkan pelayanan urusan/bidang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang terdapat tantangan dan peluang. Adapun tantangan yang dihadapi antara lain:

2.3.5. Rekomendasi Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Proiritas Tahun 2023

- a. Secara umum kinerja pelayanan Bappeda Kota Magelang sudah cukup baik. Namun ada beberapa indikator yang tidak mencapai target, yaitu persentase capaian sasaran pembangunan dalam RPJMD, RKPD, Renstra, Renja. Perlu kerja keras untuk mencapai target indikator tersebut pada akhir tahun RPJMD mengingat bahwa pada tahun 2021 masih dimungkinkan terjadi pandemi Covid-19.
- b. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam pada tahun 2020 sudah cukup baik dan sudah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2021, perlu kerja keras untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan karena dengan adanya pandemic Covid-19, maka tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan Musrenbang seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun diupayakan untuk tetap bisa menangkap aspirasi dari stakeholder sebagai usulan yang dapat diakomodir sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.

Beberapa kendala yang perlu untuk diantisipasi ke depan antara lain:

- a) Masih diperlukannya sinergisitas proses perencanaan pembangunan daerah dari pendekatan politik (proses politik) ke pendekatan teknokratik.
- b) Perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah harus terus dioptimalkan untuk meminimalisasi deviasi. Diperlukan berbagai inovasi dan strategi mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan percepatan pencapaian indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan pada awal periode perencanaan;
- c) Masih memerlukan ruang pemahaman perencanaan di setiap level pada OPD. Tingkat kapasitas pemahaman terkait proses dan substansi perencanaan di setiap level pada OPD masih belum optimal;
- d) Masih di perlukannya penguatan data untuk mendukung proses perencanaan, meskipun dari tahun ke tahun sudah mengalami kemajuan, proses perencanaan teknokratik yang berbasis pada data sekunder dan primer, baik dari hasil monitoring dan evaluasi maupun hasil kajian/telaahan, masih perlu dilakukan penguatan sehingga mampu menjadi dasar analisis kebijakan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik;
- e) Tantangan pada fungsi perencanaan semakin tinggi, seiring kompleksitas dan tuntutan akselerasi atas kesejahteraan masyarakat dihadapkan dengan berbagai kondisi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta dinamika global. Sehingga membutuhkan solusi dengan pendekatan pemikiran dan langkah yang kreatif dan inovatif.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2023

Sebagai landasan operasional dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 yaitu mengacu pada Surat Edaran Walikota Magelang nomor 050.24/56/410, tanggal 2 Februari 2022 perihal Penyusunan Rancangan Renja OPD Tahun 2023 dan telah dilaksanakan verifikasi rencana kerja perangkat daerah yang diperkuat dengan berita acara.

Rancangan Awal RKPD Kota Magelang telah mengakomodir kebutuhan perangkat daerah sebagaimana tertuang dalam Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan indikator sub kegiatan.

Secara makro, usulan program yang diusulkan sejumlah 4 program, 16 kegiatan, dan 62 sub kegiatan dengan total usulan pagu anggaran sejumlah 10,571,747,000 rupiah. Program-program dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 telah mempertimbangkan beberapa hal yang prioritas dan kebijakan nasional dan kebijakan daerah selain beberapa program kegiatan rutin yang dilaksanakan semua OPD dan menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal terkait prioritas dan kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan program kegiatan di dalam Renja 2023, seperti: a). pencapaian visi misi kepala daerah, b). pencapaian SDGs, c). pengentasan kemiskinan, d). pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan kebijakan atau prioritas lainnya. Hal-hal tersebut di atas tercermin di dalam program dan kegiatan yang terdapat di dalam Renja 2023.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Magelang Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kota Magelang

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PERENCANAAN					PERENCANAAN					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.842.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2.842.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.388.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	2.388.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.554.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	2.333.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1.160.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	930.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1.240.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	960.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2 laporan	4.685.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Kota Magelang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan	2 laporan	53.605.000	Pendampungan SAKIP

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	7.457.651.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 orang	4.883.700.288	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	34.728.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	32.726.060	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 laporan	1.274.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappeda	1 laporan	1.274.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.243.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokumen	1.243.000	
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	7.998.100	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	9.028.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	8.207.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	31.482.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	32.140.900	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.610.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Magelang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	7.387.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.696.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 dokumen	4.100.000	
	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	16.328.000	Penyediaan Bahan/Material	Kota Magelang	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 paket	14.841.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	2.614.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	2.280.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	99.680.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	76.812.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	9.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1.039.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	82.800.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	85.246.709	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	199.277.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Magelang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 laporan	183.266.983	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	138.741.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 unit	135.068.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	44.716.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Magelang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 unit	44.491.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Magelang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Magelang	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit	3.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	53.765.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 unit	53.704.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	59.719.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Magelang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	59.713.786	
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Magelang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 berita acara	47.166.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kota Magelang	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	4 berita acara	47.012.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9 berita acara	83.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9 berita acara	38.401.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	85.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 berita acara	62.765.000	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 dokumen	311.042.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan	4 dokumen	636.870.860	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota		Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)			
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	30 orang	61.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Magelang	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	30 orang	73.000.000	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	12.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	2 buku	12.000.000	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	50.000.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	4 laporan	20.000.000	
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	12.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 dokumen	22.000.000	
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	87.638.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	66.998.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	13.772.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	22.172.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	15.043.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 laporan	14.630.100	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 laporan	56.593.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 laporan	40.104.700	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	108.038.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 laporan	105.098.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	16.832.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	37.769.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	18.103.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 laporan	23.910.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	93.063.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 laporan	75.133.460	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	24.480.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	31.775.600	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 laporan	5.158.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 laporan	12.038.800	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	12.940.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 laporan	10.713.900	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	84.358.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 laporan	80.651.021	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Daerah Bidang Perekonomian					Daerah Bidang Perekonomian					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	25.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 dokumen	31.140.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 dokumen	20.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 dokumen	15.139.500	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 laporan	8.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 laporan	7.439.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	35.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 laporan	35.499.200	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	49.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 dokumen	48.999.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	19.750.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 laporan	19.748.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		8.550.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		8.549.800	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		88.000.000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur		85.807.060	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	3 laporan	100.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	3 laporan	104.810.900	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Magelang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen	25.000.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Kota Magelang	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 dokumen	10.550.200	
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Magelang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 rekomendasi	100.000.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Kota Magelang	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 rekomendasi	51.858.000	

No	Rancangan Awal RPKD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - spek Sosial	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - spek Sosial	1 dokumen	245.957.900	
	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	50.000.000	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	56.559.800	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-	-	-	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
		-	-	-	-	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 dokumen	321.195.000	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi					Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	240.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Magelang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 dokumen	228.294.460	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 dokumen	140.000.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 dokumen	237.696.000	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 dokumen	100.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2 dokumen	81.914.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 laporan	70.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Magelang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 laporan	63.140.660	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		20.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Magelang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		20.000.000	
	TOTAL				10.571.747.000					8.808.640.947	

Berdasarkan tabel diatas, terdapat perubahan anggran antara Rancangan awal RKPD 2023 dengan analisis hasil kebutuhan, dimana terdapat pengurangan jumlah anggran sebesar Rp 1.763.106.053.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagai unsur perencana pembangunan daerah melakukan penjaringan aspirasi masyarakat yaitu pelaksanaan Musrenbang secara berjenjang melalui Musrenbang Desa/Kelurahan, sampai Musrenbang Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, Regional dan Nasional tetap melakukan upaya dalam rangka pelaksanaan pentahapan proses perencanaan pembangunan. Di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut dilakukan pengkajian usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada SKPD serta berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dan berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas pembangunan tahun 2023 yang tertuang di dalam RPJMD 2021-2026. Usulan dari pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Usulan Program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan hingga Musrenbang Tingkat Kota untuk tahun 2023 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang. Untuk penyusunan renja tahun 2023 tidak ada usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang berasal dari masyarakat maupun DPRD Kota Magelang untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023 Kota Magelang

Nama Perangkat Daerah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Benang merah perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah untuk mewujudkan sinergitas dengan perencanaan pembangunan Nasional adalah dengan merujuk pada RPJMN 2020-2024 dengan tema *Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong*. Sasaran pembangunannya adalah *mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing*.

Dalam rancangan teknokratik, RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam 7 agenda pembangunan yaitu (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Perhatian utama adalah kepada **7 (tujuh)** Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024 sebagai penerjemahan 4 (empat) pilar RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama periode terakhir RPJPN 2005-2025; serta **5 (lima)** arahan utama Presiden RI terkait fokus Pembangunan Rancangan Akhir RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi.

RKP 2023 bertema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yang dilaksanakan melalui sejumlah Major Project, yakni pengembangan kawasan industri prioritas dan smelter, pengelolaan terpadu UMKM, food estate, destinasi pariwisata prioritas, akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi, reformasi sistem perlindungan sosial, kesehatan nasional, dan pendidikan keterampilan, percepatan penurunan kematian ibu dan stunting, wilayah adat Papua: Laa Pago dan Domberay, pembangunan Ibu Kota Nusantara, jaringan pelabuhan utama terpadu, transformasi digital, dan pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Sebagai RKP tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, RKP 2023 dijabarkan dalam 8 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan, yaitu (1) percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem; (2) peningkatan kualitas SDM melalui kesehatan dan pendidikan; (3) penanggulangan pengangguran disertai peningkatan decent job; (4) mendorong pemulihan dunia usaha; (5) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; (6) pembangunan rendah karbon dan transisi energi; (7) percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi; dan (8) pembangunan Ibu Kota Nusantara.

RKP 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen, Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen, Rasio Gini 0,375–0,378, Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49, Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen, Nilai Tukar Petani 103–105, dan Nilai Tukar Nelayan 106–107.

RPJMN 2020-2024 menargetkan Indikator pada setiap dinas. Target RPJMN ini menghadapi tantangan global yang belum kondusif, merupakan dampak dari bencana virus corona (Covid-19) pada awal Tahun 2020.

Dokumen perencanaan pembangunan tingkat Provinsi Jawa Tengah yang dipedomani dalam menyusun RKPD Kota Magelang Tahun 2023 adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 diarahkan pada “Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”. Adapun prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diarahkan pada :

- a) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
- b) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
- c) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
- d) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah;

Dalam Penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Magelang Tahun 2023 mengacu pada kebijakan Nasional, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Magelang

Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Kota Magelang
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangan aspek berkelanjutan Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan Pengembangan kawasan strategis Perluasan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan Percepatan penanggulangan kemiskinan
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan Pengembangan kawasan strategis
Meningkatkan Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing	Peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangan aspek berkelanjutan Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan Pengembangan kawasan strategis

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan Pengembangan kawasan strategis Peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan layanan dasar dan tata kelola pemerintahan

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**Magelang Maju, Sehat dan Bahagia**”. Rumusan Visi Kota Magelang mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kota Magelang dan pembangunan masyarakat Kota Magelang. Kota Magelang diarahkan untuk menjadi kota yang maju dan kota yang sehat. Sedangkan dalam membangun masyarakat Kota Magelang, diarahkan untuk menjadi masyarakat yang sehat dan masyarakat yang bahagia.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Masyarakat Yang Religijs, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq**
Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang **bahagia**. Masyarakat Kota Magelang yang religijs, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religijs selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religijsitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga. Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi. Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama daam mewujudkan masyarakat religijs, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.
2. **Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia**
Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi **Kota** dan **masyarakat** Magelang yang **sehat**, serta **masyarakat** Kota Magelang yang **bahagia**. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat.

Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip *universal design* harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja.

Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (*human intelligence*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju.

Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju.

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia. Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing.

Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu menjawab tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal.

Kinerja penataan ruang akan menjadi ‘panglima’ dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk menjawab kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Berdasarkan penjabaran atas Visi-Misi dan Program Unggulan Kota Magelang Tahun 2021-2026 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan komponen visi Magelang sebagai Kota yang Maju, dengan berkontribusi untuk mendukung pencapaian dari Misi 3 yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif”

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi 3 tersebut, tujuan yang dirumuskan dalam Renstra Bappeda Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah “**Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**”.

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan
- 2) Meningkatkan Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah
- 3) Meningkatkan pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah

Berdasarkan uraian tujuan dan sasaran tersebut, maka indikator kinerja tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.2
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formula Hitung	KONDISI AWAL	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
					2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Kualitas perencanaan pembangunan daerah	$\sum ((40 \times \text{persentase perangkat daerah dengan nilai LHE AKIP Perencanaan minimal } 24,5) / 100) + ((60 \times \text{Persentase ketercapaian target daerah}) / 100))$	NA	79,51%	80,98%	82,44%	83,90%	85,37%	85,37%
1.1		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai LHE AKIP komponen perencanaan minimal 24,5	$\frac{\sum \text{PD dengan LHE AKIP Komponen Perencanaan } 24,5}{\sum \text{Target PD dengan LHE AKIP Komponen Perencanaan } 24,5} \times 100\%$	42,86% (12 OPD)	67,85% (19 OPD)	78,85% (22 OPD)	89,29% (25 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)	100% (28 OPD)
1.2		Meningkatnya Efektifitas Fungsi Pengendalian dan Evaluasi Capaian Sasaran Daerah	Persentase ketercapaian target sasaran daerah	$\frac{\sum \text{indikator tujuan sasaran RPJMD yang tercapai targetnya}}{\sum \text{seluruh indikator tujuan sasaran RPJMD}} \times 100\%$	63,86%	65,85%	68,29%	70,73%	73,17%	75,61%	75,61%
1.3		Meningkatnya pemanfaatan penelitian, pengembangan dan inovasi untuk kebijakan daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	$\frac{\sum \text{kelitbangan dalam RKPD}}{\sum \text{kelitbangan dalam RPJMD}} \times 100\%$	NA	17,02%	36,17%	55,32%	76,60%	100%	100%
			Persentase pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan dan inovasi	$\sum \text{Realisasi indikator program 1 (Kelitbangan)} + \text{Realisasi indikator program 2 (inovasi)}$	26,10%	24%	49%	65,17%	66,31%	68,44%	68,44%

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program, kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang tahun 2023 selanjutnya dibahas sesuai tahapan perencanaan, baik melalui desk maupun rasionalisasi mandiri. Pagu anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang sebagaimana tertuang dalam matrik yang sudah diinput melalui aplikasi SIPD sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Dan Prakiraan Maju Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	1				PERENCANAAN								
5	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
5	1	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Magelang	2 dokumen	2.842.000	APBD		2 dokumen	2.842.000
5	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Magelang	1 dokumen	2.388.000	APBD		1 dokumen	2.388.000
5	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Magelang	1 dokumen	2.333.000	APBD		1 dokumen	2.333.000
5	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Magelang	1 dokumen	930.000	APBD		1 dokumen	930.000
5	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Magelang	1 dokumen	960.000	APBD		1 dokumen	960.000
5	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Magelang	2 laporan	53.605.000	APBD	Penda mpon gan SAKI P	2 laporan	53.605.000
5	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Magelang	30 orang	4.883.700.288	APBD		30 orang	4.883.700.288
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Magelang	12 dokumen	32.726.060	APBD		12 dokumen	32.726.060
5	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Magelang	1 laporan	1.274.000	APBD		1 laporan	1.274.000
5	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Magelang	1 dokumen	1.243.000	APBD		1 dokumen	1.243.000
5	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
5	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Magelang	1 laporan	7.998.100	APBD		1 laporan	7.998.100
5	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	12 paket	8.207.000	APBD		12 paket	8.207.000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	12 paket	32.140.900	APBD		12 paket	32.140.900
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Magelang	4 paket	7.387.000	APBD		4 paket	7.387.000
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Magelang	12 dokumen	4.100.000	APBD		12 dokumen	4.100.000
5	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Kota Magelang	4 paket	14.841.000	APBD		4 paket	14.841.000
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Magelang	4 laporan	2.280.000	APBD		4 laporan	2.280.000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Magelang	1 laporan	76.812.000	APBD		1 laporan	76.812.000

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Magelang	2 laporan	1.039.500	APBD		2 laporan	1.039.500
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Magelang	12 laporan	85.246.709	APBD		12 laporan	85.246.709
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Magelang	8 laporan	183.266.983	APBD		8 laporan	183.266.983
5	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
5	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Magelang	18 unit	135.068.000	APBD		18 unit	135.068.000
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Magelang	18 unit	44.491.000	APBD		18 unit	44.491.000
5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Magelang	4 unit	3.000.000	APBD		4 unit	3.000.000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Magelang	12 unit	53.704.000	APBD		12 unit	53.704.000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Magelang	2 unit	59.713.786	APBD		2 unit	59.713.786
5	1	2			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH								
5	1	2	2		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Magelang	4 berita acara	47.012.000	APBD		4 berita acara	47.012.000

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Magelang	9 berita acara	38.401.000	APBD		9 berita acara	38.401.000
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Magelang	1 berita acara	62.765.000	APBD		1 berita acara	62.765.000
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Magelang	4 dokumen	636.870.860	APBD		4 dokumen	636.870.860
5	1	2	2		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
5	01	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Magelang	30 orang	73.000.000	APBD		30 orang	73.000.000
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Magelang	2 buku	12.000.000	APBD		2 buku	12.000.000
5	1	2	2		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Magelang	4 laporan	20.000.000	APBD		4 laporan	20.000.000
5	1	2	2		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
5	01	02	2.04	02	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Kota Magelang	1 dokumen	22.000.000	APBD		1 dokumen	22.000.000
5	1	3			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH								
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	4 dokumen	66.998.000	APBD		4 dokumen	66.998.000
5	01	03	2.01	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	1 laporan	22.172.000	APBD		1 laporan	22.172.000
5	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	1 laporan	14.635.000	APBD		1 laporan	14.635.000
5	01	03	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Kota Magelang	2 laporan	40.571.000	APBD		2 laporan	40.571.000
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	1 laporan	105.098.000	APBD		1 laporan	105.098.000
5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	1 laporan	37.769.000	APBD		1 laporan	37.769.000
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	1 laporan	23.910.000	APBD		1 laporan	23.910.000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Kota Magelang	3 laporan	77.326.000	APBD		3 laporan	77.326.000
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Kota Magelang	1 dokumen	31.775.600	APBD		1 dokumen	31.775.600

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)							
5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Magelang	3 laporan	12.038.800	APBD		3 laporan	12.038.800
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Kota Magelang	1 laporan	10.713.900	APBD		1 laporan	10.713.900
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Kota Magelang	1 laporan	80.651.021	APBD		1 laporan	80.651.021
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	1 dokumen	31.140.000	APBD		1 dokumen	31.140.000
5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	1 dokumen	15.139.500	APBD		1 dokumen	15.139.500
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Kota Magelang	2 laporan	7.439.000	APBD		2 laporan	7.439.000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Kota Magelang	1 laporan	35.499.200	APBD		1 laporan	35.499.200
5	1	3	2		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase ketersediaan kajian strategis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Kota Magelang	4 dokumen	48.999.000	APBD		4 dokumen	48.999.000

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	1 laporan	19.748.900	APBD		1 laporan	19.748.900
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	1 laporan	8.549.800	APBD		1 laporan	8.549.800
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Kota Magelang	2 laporan	85.807.060	APBD		2 laporan	85.807.060
5	5				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5	5	2			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Kota Magelang	3 laporan	104.810.900	APBD		3 laporan	104.810.900
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Magelang	1 dokumen	10.550.200	APBD		1 dokumen	10.550.200
5	05	02	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Kota Magelang	1 rekomendasi	51.858.000	APBD		1 rekomendasi	51.858.000
5	5	2	2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan								
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - spek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek - spek Sosial	Kota Magelang	1 dokumen	245.957.900	APBD		1 dokumen	245.957.900
5	05	02	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Kota Magelang	1 dokumen	56.559.800	APBD		1 dokumen	56.559.800

No					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Maju Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
5	05	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Magelang	1 dokumen	321.195.000	APBD		1 dokumen	321.195.000
5	5	2	2		Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kota Magelang	2 dokumen	228.294.460	APBD		2 dokumen	228.294.460
5	05	02	2.04	02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Kota Magelang	2 dokumen	237.696.000	APBD		2 dokumen	237.696.000
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Kota Magelang	2 dokumen	81.914.000	APBD		2 dokumen	81.914.000
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Kota Magelang	2 laporan	63.140.660	APBD		2 laporan	63.140.660
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Kota Magelang	1 laporan	20.000.000	APBD		1 laporan	20.000.000
					TOTAL				8.808.640.947				8.808.640.947

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan sebagaimana analisis kebutuhan program dan kegiatan yang disajikan pada bab sebelumnya merupakan hasil analisis atas kebijakan-kebijakan pusat, provinsi dan daerah terkait fungsi penunjang perencanaan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda Kota Magelang. Beberapa program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh peraturan tentang perencanaan pembangunan adalah penyusunan dokumen RKPD dari pelaksanaan musrenbang sampai dengan penyusunan perwal RKPD. Selain itu, mulai tahun 2013 disusun Perubahan RKPD sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan tahun berkenaan.

Program-program dalam penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Tahun 2023 telah mempertimbangkan beberapa hal yang prioritas dan kebijakan nasional dan kebijakan daerah selain beberapa program kegiatan rutin yang dilaksanakan semua OPD dan menjadi pendukung pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal terkait prioritas dan kebijakan yang menjadi landasan dalam penyusunan program kegiatan di dalam Renja 2023, seperti: a). pencapaian visi misi kepala daerah, b). pencapaian SDGs, c). pengentasan kemiskinan, d). pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan kebijakan atau prioritas lainnya. Hal-hal tersebut di atas tercermin di dalam program dan kegiatan yang terdapat di dalam Renja 2023.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diupdate dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdampak pada perubahan indikator sub kegiatan. Secara makro, usulan program yang diusulkan sejumlah 4 program, 17 kegiatan, dan 65 sub kegiatan dengan total usulan pagu anggaran sejumlah 8.808.640.947 rupiah.

BAB 5

PENUTUP

Penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Magelang Tahun 2023 merupakan penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Disamping itu juga untuk sinergitas dalam perencanaan juga mengakomodir dan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan lainnya disamping Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2023. Adapun tema perencanaan pembangunan pada periode ini yaitu **“TERHUBUNG DAN TERSAMBUNG UNTUK MAJU, SEHAT, DAN BAHAGIA”**. Tema ini diarahkan pada “Pengembangan daya saing daerah didukung dengan masyarakat yang berdaya,”, dengan fokus prioritas pada: Percepatan penanggulangan kemiskinan; Penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan; Perluasan akses partisipasi masyarakat dalam pembangunan; Peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat; Penguatan potensi ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan; Pengembangan kawasan strategis; Pengembangan integrasi sistem informasi; Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan; dan Pengembangan inovasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah memiliki peran penting dalam memberikan bahan masukan penyusunan RKPD, dimana memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholders*) melalui Forum Perangkat Daerah dan FGD serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) guna menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan. Melalui pendekatan teknokratis dan partisipatif, *bottom up/top down*, program dan kegiatan disusun guna menjamin perbaikan berkesinambungan (*continues improvement*).

Dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan Renja dan pencapaian indikator RPJMD sampai dengan Tahun 2021 serta pencapaian indikator kinerja OPD. Dokumen ini juga memuat perumusan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya untuk anggaran Tahun 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang. Dokumen ini selanjutnya menjadi dasar perumusan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Mengingat dokumen Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 maka perlu ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023 disusun dengan mengakomodir usulan masyarakat dalam musrenbang dan forum perangkat daerah yang diselaraskan dengan program prioritas dalam RKPD Tahun 2023.
2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023, perlu dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang direncanakan.
3. Eselon III selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang berada dalam lingkup perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang berkewajiban menjamin

konsistensi penyusunan RKA Tahun 2023 dengan berpedoman pada Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang Tahun 2023.